

Perhutani Klaim Ratusan Hektar...

tidak takut dengan Perhutani. Sepetak meminta agar BPN segera mungkin membagikan sertifikat masyarakat Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang.

“Bilamana pihak Perhutani tidak mampu menunjukkan bukti otentik berdasarkan kesepakatan hasil rapat audiensi pekan lalu, maka BPN berkewajiban untuk membagikan sertifikat hak milik masyarakat Desa Tanjung Pakis yang saat ini diklaim oleh pihak Perhutani,” ujar Ketua Umum Sepetak, Wahyudien, Selasa (6/8/2019).

Hal itu, kata Wahyudien, berdasarkan hasil rapat audiensi yang dipimpin oleh Asda1 Kabupaten Karawang yang dihadiri oleh pihak Perhutani, BPN dan Sepetak bersama perwakilan masyarakat pada pekan lalu.

“Apabila pihak Perhutani dalam waktu yang disepakati tersebut maka kami Sepetak bersama-sama masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengambil sertifikat itu di BPN Karawang,” tegas Wahyudien.

Menurut Wahyudien dasar-dasar yang disampaikan oleh Perhutani untuk mengklaim tanah-tanah masyarakat tidak tepat. Salah satunya adalah SK Menteri Pertanian Nomor 92 tahun 1954 dan SK menteri LHK nomor 195 tahun 2003.

Batas-batas lahan kehutanan di Desa Tanjung Pakis, Perhutani tidak bisa membuktikan atau membawa bukti SK Mentan 54 dan BATB yang lama atau terbaru.

“Padahal di SK Mentan 54 tidak ada menunjukkan bahwa Desa Pakis Jaya adalah kawasan hutan, di

SK tersebut menjelaskan bahwa batas kehutanan adalah ujung Karawang, di dalamnya menerangkan bahwa kawasan hutan ada di Bekasi sampai Jakarta,” ungkapnya.

BATB kata dia, tidak serta merta hadir sendirinya harus melalui mekanisme penunjukan, pemetaan, penetapan dan pengesahan.

“BATB itu istilahnya bukti hak perhutani untuk menguasai tanah kawasan hutan dari hasil penunjukan, namu sejak lama persoalan yg paling mendasar yakni BATB, perhutani selalu tidak mampu membuktikannya,” pungkasnya.

Diketahui, sengketa lahan ini terjadi antara warga dari 7 desa di Kecamatan Pakijaya, Tirtajaya dan Batujaya seluas 800 Hektar.

Warga Demo ke Kantor Bupati

Sementara itu, ratusan petani Desa Tanjung Pakis Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, mendatangi Kantor Bupati Karawang, Kamis (15/8/2019).

Aksi demonstrasi para petani ini dilakukan pada saat seluruh pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karawang, termasuk Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana, hadir dalam kegiatan Riung Mumpulung, Dialog Kemerdekaan Republik Indonesia, di halaman gedung kantor Plaza Pemda Karawang.

Para petani menuntut Pemkab untuk segera mengeluarkan sertifikat tanah mereka.

Hal ini, menurut para petani, sesuai dengan janji yang diberikan Badan Pertahanan Nasional (BPN)

Kabupaten Karawang dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang.

Wastini (35), salah satu peserta aksi mengaaku hanya ingin BPN dan Pemda segera membagikan sertifikat mereka.

Karena para petani itu sudah menunggu lama sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi ini untuk segera dibagikan.

Bahkan, tak sedikit petani yang telah dimintai sejumlah uang oleh oknum pegawai desa dan menjanjikan sertifikat mereka akan segera selesai.

“Namun nyatanya sampai hari ini, sertifikat kami belum juga dibagikan, ada ribuan hektar dan ribuan kepala keluarga yang menanti sertifikat ini,”ujarnya.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana langsung menemui para pengunjuk rasa. Ia mengatakan jika pihak Pemda Karawang sudah melakukan upaya dengan berkurim surat kepada BPN agar permasalahan sertifikat ini segera diselesaikan.

Demo Petani Desa Tanjung Pakis

Pemda, kata Cellica, akan menjadi mediator dan fasilitator antara petani dengan pihak BPN.

“Mohon bersabar, karena semua ada aturannya, dan harus dikomunikasikan dengan berbagai pihak terkait termasuk perhutani dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Cellica juga meminta pihak petani mempercayakan kepada Pemda untuk membantu memfasilitasi dan memediasi dengan pihak BPN. (red)